



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Jln. Opi Raya – Jakabaring, Palembang - Sumatera Selatan, 30257

Email: ptsp@pttun-palembang.go.id

Palembang, 12 Juli 2024

Nomor : 537/KPTTUN.W5-TUN/OT1.6/VII/2024
Lampiran :
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Tahun 2023

Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang
Di-
Tempat

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disampaikan hal-hal:

1. Evaluasi atas Laporan Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dimaksudkan untuk:
 - a. memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
 - b. menilai tingkat implementasi SAKIP;
 - c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
 - d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
 - e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 komponen manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
3. Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang memperoleh nilai sebesar **87,90** atau **A (Memuaskan)**.
4. Nilai tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja, dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen / Sub Komponen Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Tahun 2022	Tahun 2023
1	Perencanaan Kinerja	30,00	27,00	23,70
2	Pengukuran Kinerja	30,00	27,00	27,90
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,60	13,80
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	21,25	22,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja			87,85	87,90
			A	A
			(MEMUASKAN)	(MEMUASKAN)

No	Catatan
A. Perencanaan Kinerja	
1.	Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia, namun terdapat kondisi: a. Belum menyajikan Matriks Pendanaan dan Dokumen RKA/KL 2023 ;
2.	Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standart yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting), namun terdapat kondisi : a. Belum terdapat Dokumen RKA/KL yang menunjukkan telah terjadi perubahan pada IKU;
B. Pengukuran Kinerja	
1.	Pengukuran Kinerja telah dilakukan ; a. Mekanisme pengumpulan dan pengukuran kinerja telah dijadwalkan waktu pelaksanaan pengumpulan dan pengukuran data kinerja, serta telah menyiapkan Jadwal Monev pengukuran kinerja sesuai Rencana Aksi; b. Telah terdapat mekanisme yang jelas atas pengumpulan data kinerja.
2.	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, namun terdapat kondisi dimana Belum dilaksanakannya Rapat Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Anggaran.
C. Pelaporan Kinerja	
1.	Dokumen Laporan Kinerja sudah disusun memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya, terdapat kondisi Laporan Kinerja telah menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja sebagai langkah perbaikan.
2.	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya, namun terdapat kondisi: a. Laporan Kinerja sebagian telah menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	
1.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan, dan seluruh rekomendasi dari Laporan Hasil Evaluasi juga telah dilaksanakan;
2.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai, terdapat kondisi tim penyusun SAKIP sebagian masih terdapat yang belum mengikuti kegiatan pelatihan SAKIP.
3.	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja.

No	Rekomendasi
A. Perencanaan Kinerja	
1.	Pada pengelolaan dokumen perencanaan kinerja : a. Agar melengkapi dokumen Matriks Pendanaan dan Dokumen RKA/KL 2023;
B. Pengukuran Kinerja	
1.	Pada pengukuran kinerja yang telah dilakukan, agar : a. Melaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Anggaran, (Undangan, Daftar Hadir, Foto dan Notulen)
C. Pelaporan Kinerja	
1.	Dalam upaya pelaporan kinerja memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya, agar : a. Laporan Kinerja menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja (dengan membuat analisis efisiensi sesuai dengan Lampiran pada Pedoman Evaluasi AK Nomor: 878/SEK/SK/VII/2022).
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	
1.	Terhadap Hakim dan Aparatur yang menyusun dan/atau mengevaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang belum mengikuti pelatihan SAKIP agar dapat diusulkan memperoleh pelatihan SAKIP agar penyusunan AKIP sepenuhnya dilaksanakan secara berkualitas oleh SDM yang memadai dan kompeten atau dapat diusulkan melalui surat ke pusat.

Demikian hasil evaluasi atas Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2023, dengan harapan agar rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti paling lambat tanggal 19 Agustus 2024 oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Terimakasih.

Ketua,

A. SYAIFULLAH, S.H. 

Tembusan Yth:

1. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Badan Peradilan TUN;
3. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi MA RI;
4. Arsip